

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan yang cukup rawan dari berbagai tahapan pelaksanaan pemilu yaitu kampanye karena peserta pemilu tidak hanya parpol, namun juga peserta pemilu perseorangan seperti calon anggota DPD dan calon presiden. Kampanye pemilu menakutkan bagi sebagian masyarakat. Sebab saat itu rakyat bukan hanya menyaksikan parpol unjuk janji saja, tetapi adalah saat-saat hak asasi kita hilang. Tak bisa menikmati ketenangan di jalan, ketika berpapasan dengan para peserta kampanye. Polusi bunyi karena knalpot motor yang bising belum lagi dengan tindakan peserta kampanye yang memonopoli luas jalan, tanpa menghiraukan pengguna jalan yang lainnya, hal ini terlihat dari observasi penulis waktu kampanye partai politik pemilu 2004 . Peserta kampanye bisa menjadi momentum mencemaskan, karena dalam pengalaman kampanye sebelumnya, pelanggaran terhadap aturan, etika kampanye, kekerasan dan sebagainya selalu terjadi.

Bangsa Indonesia telah berkali-kali menyelenggarakan pemilu lengkap dengan kegiatan kampanyenya, namun sayangnya orientasi pemilu dalam melakukan kampanye masih bersifat jangka pendek (dukungan secara sebanyak-banyaknya), tidak jangka panjang mencerdaskan kehidupan berbangsa, seperti mendidik kesadaran berpolitik, memunculkan para pemilih rasional, dan menyemai kehidupan politik yang demokratis. Karena kecenderungannya berorientasi jangka pendek maka selama kampanye...

penggunaan uang, show of force (kampanye dengan konvoi sebagai sarana unjuk kekuatan), intimidasi lunak sampai pada ancaman fisik, monopoli penampilan (menghambat akses pesaing untuk tampil didepan public), demonizing kandidat pesaing, menjanjikan insentif kebajikan yang tidak realistis serta eksploitasi isu sensitif. Sementara kegiatan elit politik yang selalu tampil dengan slogan-slogan membela rakyat kecil namun dalam kenyataannya justru menimbulkan kebingungan bagi masyarakat kecil, juga mereka faktor yang dapat menimbulkan bentuk-bentuk konflik atau gangguan kamtibmas.

Di Indonesia metode kampanye yang banyak digunakan oleh partai politik adalah metode mimbar bebas yang banyak mengundang kerumunan massa yang diikuti oleh konvoi massa. Banyak dari partai politik yang berkampanye pada saat menjelang pemilu sehingga seolah-olah anggapan dari masyarakat bahwa partisipasi politik adalah ikut meramaikan pemilu lewat aktif dalam setiap kampanye partainya. Pesta demokrasi lima tahun sekali inilah yang kemudian oleh masyarakat dijadikan tempat untuk mencurahkan partisipasi dalam setiap kampanye partai karena partai politik tidak juga pernah melibatkan atau mengajarkan cara berpolitik yang sebenarnya kepada massa partainya.

Konvoi massa yang partai politik sangat melibatkan massa banyak sangat berpotensi timbulnya bentrokan baik yang diakibatkan kesalahpahaman maupun simpatisan yang kadang mengundang untuk menimbulkan bentrokan fisik selain itu konvoi tersebut mayoritas diikuti masyarakat yang rata-rata anak muda, dimana jiwa muda lebih cepat terbakar ketika menghadapi masalah dan sulit menyelesaikan masalah dilanangan dengan pikiran yang rasional

Selama ini penyelenggaraan pemilu pada masa dulu hingga kampanye saat ini masih diwarnai dengan bentuk dan model pengerahan massa pada saat kampanye. Melihat pengalaman *euphoria* kampanye dengan penggalangan massa yang berdampak pada kebingungan khalayak, yang cenderung bagi sebagian masyarakat menakutkan dan tidak simpatik. Untuk menerangkan suatu kampanye dialogis serta melarang suatu arak-arakan pemilu dalam pelaksanaannya memang serba repot. Apapun alasannya, rapat umum dan terbuka untuk kampanye pemilu tampaknya masih tetap menjadi panggung yang paling marak. Untuk melaksanakan rapat umum ini, tak terhindarkan lagi peserta kampanye akan datang ramai-ramai ketempat terlaksananya kampanye. Alhasil, karena ramai-ramai bahkan disertai pula atribut identifikasi Orsospol yang didukung akhirnya ; terjadilah arak-arakan<sup>1</sup>. Arak-arakan yang memakai identifikasi ini tak terhindarkan dapat membangkitkan kesadaran massa, membangkitkan rasa mampu, rasa percaya diri maupun kesadaran kolektif. Inilah akhirnya akses-akses muncul : insiden, kecelakaan, bahkan terjadi bentrokan. Dalam praktek, melarang arak-arakan tentu tidak gampang. Apabila pemerintah telah terlanjur memasyarakatkan pemahaman bahwa pemilu adalah pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia, yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Akhirnya muncul pertanyaan : dimanakah letak ekspresi dan makna pesta itu jika bukan pada arak-arakan, rapat raksasa, menari dan menyanyi serta mendengarkan pidato berapi-

---

<sup>1</sup> Dhurorudin Mashad, *Korupsi politik, pemilu dan legitimasi pasca orde baru*. Jakarta, PT Pustaka Cidesindo, 1999, hal. 56.

semakin lebar antara aspirasi yang meningkat dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin sukar diupayakan.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah otonomi dari daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah kotamadya Yogyakarta (Poltabes Yogyakarta) terdiri dari 14 kecamatan (Polsek) dengan luas 32,50 km dan berbatasan sebelah barat dengan kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah selatan dengan kabupaten Bantul, Sebelah timur dengan kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah utara dengan kabupaten Sleman. Jumlah penduduk daerah kota Yogyakarta dalam laporan kunjungan kerja tim Was OPS Mantap Brata XII tahun 2004 ITWASUM Polri di Poltabes sebanyak 505.819 jiwa, yang terdiri dari 259.705 laki-laki dan 246.114 perempuan<sup>3</sup>.

Berdasarkan analisis terhadap kecenderungan lingkungan strategis kontijensi yang mungkin timbul dan dapat mempengaruhi situasi kamtibmas di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta pada 2004 adalah sebagai berikut:

Kontijensi “kerusuhan massal” dengan indikator<sup>4</sup> :

1. Masih ada kegiatan yang cukup potensial dari golongan tertentu yang berusaha memanfaatkan setiap kerawanan sosial untuk merongrong kewibawaan pemerintah.

---

<sup>3</sup> Laporan Kunjungan Kerja Tim Was OPS Mantap Brata XII Progo tahun 2004 ITWASUM Polri di Poltabes Yogyakarta.

<sup>4</sup> Laporan Rencana Strategis Poltabes Yogyakarta tahun 2004-2008.

2. Besarnya jumlah angkatan kerja yang tidak tertampung dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan akan mudah dihasut oleh oknum-oknum tertentu untuk menimbulkan terjadinya kerusuhan sosial.
3. Kelahiran LSM-LSM yang mampu merebut simpati masyarakat dapat memicu ketidakpuasan masyarakat untuk kepentingan tertentu.
4. Kasus kerusuhan sosial dan kebingungan massa akibat masalah sosial budaya dan Sara.
5. Kontijensi “kerusuhan massal” sangat berpeluang terjadi di wilayah hukum Polsek Gondomanan, Mantrijeron, Mergangsan, Umbul Harjo Gondokusuman, Danurejan, Jetis dan Tegalrejo.

Faktor yuridis berpengaruh dalam menentukan peran, tugas, fungsi dan wewenang yang harus dilaksanakan Polisi. Hal ini tersurat dalam undang-undang sebagai berikut<sup>5</sup> :

1. Bab III pasal 13 menyebutkan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia diantaranya sebagai berikut :
  - a. Memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat
  - b. Menegakkan hukum.
  - c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Bab I pasal 2, tentang fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai fungsi pemerintahan, yakni :

---

<sup>5</sup> *Undang-Undang No. 2 Tahun 1982 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

## 2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peranan Polri dalam penanganan keamanan di wilayah kota Yogyakarta. Khususnya dalam hal

- a. Tugas Polri
- b. Fungsi Polri
- c. Wewenang Polri

Seperti yang tercantum dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## D. Kerangka Dasar Teori

### 1. Peranan Polri

#### a. Peranan

Soerjono Soekanto, memberikan pengertian tentang peranan sebagai berikut :

“Peranan (Pole) adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan (Status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”<sup>6</sup>.

Peranan mencakup paling sedikit tiga hal yaitu :

- a. Peranan adalah meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Alfabeta, 2002, hal. 100.

fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dalam pelayanan kepada masyarakat.

3. Bab III pasal 15, mengenai wewenang Polisi, diantaranya sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal.
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

1. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

Para pakar politik menyatakan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, dibutuhkan bangsa yang berdisiplin tinggi, untuk memperoleh bangsa yang berdisiplin tinggi, suatu negara harus memiliki angkatan kepolisian (*police force*) yang kuat dan tangguh. Disiplin bangsa dan kekuatan polisi menjadi korelatif dan saling mempengaruhi.

Dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan dalam era globalisasi ini, Polri akan berhadapan langsung dengan berbagai permasalahan kamtibmas yang terus bertambah, sehingga memerlukan profesionalitas kerja Polisi.

Secara institusional Polisi memiliki langgam budaya organisasi dan karakteristik peran tersendiri yang berbeda dengan tentara, jaksa, Aparat Pemda, dan lain sebagainya. Sebagai aparat Negara, Polisi berfungsi protektif bagi masyarakat, sehingga dengan otoritas dan kewenangan yang dimilikinya Polisi wajib menangkal dan menanggulangi aksi dan sikap yang mengganggu atau merugikan masyarakat.

Penulis mengambil judul ini karena berdasarkan pengamatan ditempat umum terjadi peningkatan aktifitas yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan kampanye Pemilu 2004 dengan mengerahkan personel yang cukup banyak khususnya di jalan raya ataupun tempat-tempat pelaksanaan kampanye seperti, dilapangan, gedung dan sebagainya. Dan hal ini terkadang menjadikan suasana terlihat menegangkan tatkala kelompok simpatisan dalam melakukan aksi kampanye yang berbeda atribut saling bertemu. Karena berdasarkan dari informasi di

adanya simpatisan yang membawa senjata tajam yang terjadi di jalan MT. Haryono pada tanggal 16 maret 2004 oleh empat orang dan adanya aksi pengrusakan disebuah bengkel di jalan MT. Haryono dan kesemuannya dilakukan oleh simpatisan partai politik tertentu. Dari kejadian tersebut sangat terlihat sangat pentingnya peranan kepolisian dalam menjaga keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari Latar belakang masalah yang timbul bisa ditarik satu rumusan masalah sebagai berikut :

**“Bagaimana Peranan Polri dalam Penanganan Keamanan di Wilayah Kota Yogyakarta pada Kampanye Pemilu 2004? “**

## **C. Manfaat dan Tujuan Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

a. Secara teoritis, penelitian diharapkan berguna untuk menambah bagi khasanah bagi kajian ilmu pengetahuan terutama tentang peranan Poltabes DIY. Dalam hal ini mengenai penanganan keamanan di wilayah kota Yogyakarta pada masa kampanye pemilu 2004.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama bagi aparat kepolisian dalam menangani

dan pengendalian dan hal ini merupakan sesuatu kodrati. Namun di sini masyarakat kita mengenal polisi dari jauh, bahwa masyarakat punya pikiran dan gambaran bahwa Polisi orang yang menakutkan selalu siap sergap dan siap hantam dengan peralatan misalnya borgol dan pistol ditangan, "pendapat demikian itu memang menunjukkan pengertian yang bukan semestinya, sebab untuk dapat sifat Polisi yang sebenarnya diperlukan pengertian akan tugas dan kewajiban Polisi yang lebih jauh<sup>8</sup>.

Pengertian Polisi berawal dari kata Yunani, yaitu *POLITEA*, perkataan ini pada mulanya dipergunakan hanya untuk sekedar menyebut orang-orang yang menjadi warga dari negara dari kota Athena yang berarti semua usaha dan kegiatan negara termasuk kegiatan agama. Karena perkembangan luas maka urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak dan diperlukan pengamanan secara khusus, sehingga urusan atau kegiatan keagamaan dikeluarkan dari usaha *Politea*.

Pada abad ke 14 dan 15 di Perancis dan di Jerman kata *Polizea* dan pengertian kata-kata itu dikeluarkan urusan keagamaan dari usaha *Politea*, sedangkan di Inggris kata *Politea*, di Belanda dengan kata *Politea* dan di Indonesia dengan kata *polis*<sup>9</sup>.

Jelas terbukti di setiap negara akan mengartikan berbeda-beda menurut kepentingan negara yang bersangkutan. Sehingga agar orang

---

<sup>8</sup> M. Karyadi, *Polisi atau status tugas kewajiban wewenang*, pelita Bogor, 1976, hal. 9.

<sup>9</sup> *Polisi atau status tugas dan wewenang* Hal. 11. 0

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan menurut Jack C. Plano, Robert E Riggs dan Helena S. Robin adalah sebagai berikut :

*“ Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial”<sup>7</sup> “.*

Konsep diatas merupakan interaksi antara seseorang yang menjalankan peranan dengan orang yang berada disekitarnya, ketika interaksi berlangsung dalam masyarakat maka individu yang dapat memberi pelayanan lebih, serta memiliki kelebihan nilai sosial atau ganjaran akan cenderung menentukan interaksi dengan kata lain kedudukan ini memiliki kedudukan yang minim atas individu yang lain, dimana ia memiliki kekuasaan, sementara kedudukannya yang dominan dapat pula diperoleh dengan sumber yang lain selain kekayaan dan kehormatan, ada juga unsur lain seperti dengan pengetahuan serta ketrampilan yang diperoleh secara periodik.

#### **b. Kepolisian**

Polisi berdasarkan pengertian falsafahnya maka obyek ilmu Kepolisian menurut para ahli adalah “kontrol” yang berarti pengawasan

<sup>7</sup> Jack C. Plano, Robert E. Riggs, Helena S. Robin, Terjemahan Edi S. Sinaga, *Kamus analisis sosial*

dapat hidup bersama-sama dalam suasana aman dan tenteram, perlu diadakan peraturan-peraturan. Dan agar peraturan tersebut dapat ditaati, maka diperlukan sekelompok orang yang menjaganya agar tetap dilaksanakan oleh setiap orang. Begitu pula dengan negara atau pemerintah dengan adanya penguasa dari negara sebagai kuasa adanya negara adalah bertugas mengatur dan menjaga semua warga negara agar dapat hidup tenteram dan aman, ini bisa terwujud apabila mereka melakukan tugas sesuai dengan kewajibannya masing-masing dalam hidupnya.

Dengan demikian istilah Polisi (Polizea) dalam arti formal, mencakup tentang penjelasan organisasi dan kedudukan dari pada instansi Kepolisian . Sedang Polisi dalam arti materiil memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tentang tugas dan sewenangnyanya dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan Kepolisian umum maupun Kepolisian khusus. Maka dilihat dari pentingnya peran serta Polisi baik kepentingan individu maupun kepentingan negara, maka dilihat dari pentingnya peran serta Polisi baik kepentingan individu maupun kepentingan negara, maka dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan masyarakat tanpa hadirnya tokoh tersebut.

Untuk itu Polisi sangatlah penting perannya dan diperlukan sekali adanya. Sebab, selain tersebut diatas tugas yang tidak boleh dilupakan adalah menegakkan aturan hukum, karena itu anggota Polisi selalu

dalam sesuatu hubungan saling bergantung (dependent relationship) dimana manusia takut akan perampasan yang sewenang-wenang. Selain itu kebutuhan akan keamanan meliputi perlindungan akan bahaya fisik, kesehatan, bencana ekonomi dan sebagainya. Dan dewasa ini golongan kebutuhan ini telah meluas sampai meliputi mencari kebutuhan-kebutuhan seperti keamanan kerja serta sokongan finansial yang lebih besar. Rasa aman disuatu diwilayah dapat terjadi apabila tidak ada bahaya kebakaran, banjir, pencurian, penganiayaan, dan sebagainya yang meliputi masyarakat wilayah tersebut.

### **3. Kampanye Pemilu**

#### **a. Kampanye**

Kampanye adalah arena bagi partai politik untuk menawarkan program-program mereka kepada masyarakat, guna meraih dukungan suara sebesar-besarnya pada saat pemungutan suara dilakukan. Adapun bentuk bentuk kampanye yang dilakukan oleh partai-partai politik adalah sebagai berikut :

##### **1. Bentuk Langsung**

Suatu bentuk kampanye dimana komunikator atau juru kampanye langsung berhubungan dengan komunikasi atau massa, teknik yang ada :

- Door to door

Bentuk ini dirasa cukup efektif karena adanya komunikasi interpersonal dalam mensosialisasikan program-program, visi dan

adalah menegakkan aturan hukum, karena itu anggota Polisi selalu dituntut peka terhadap tugas dan wewenangnya, oleh karena itu Polisi harus penuh kasih sayang terhadap masyarakat, khususnya mereka yang tertindas dan terinjak-injak harkat martabat sebagai manusia. Dengan tugas yang tidak mudah itu, maka tidaklah gampang memilih seseorang sebagai sosok profesi polisi, hal ini karena harus dalam lubuk hatinya sudah tertanam jiwa mau berkorban dengan ikhlas.

Pengertian Polisi ini selalu berubah-ubah dari masa ke masa menurut perkembangan sifat dan bentuk negara serta pemerintah, dikalangan sarjana pun terdapat perbedaan pendapat tentang arti tugas Polisi, seperti dikatakan KIST : "Polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat negara, demi kelancaran roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan<sup>10</sup>

Pengertian dan tugas Polisi mencakup :

- a. Polisi adalah alat penegak hukum yang tugasnya memelihara keamanan di dalam negeri.
- b. Polisi sebagai pemelihara dan menjamin keamanan ketertiban umum.
- c. Polisi sebagai pembina ketertiban masyarakat.
- d. Polisi sebagai pengawas dan pengendalian masyarakat.

---

<sup>10</sup> M. M. L. ...

- e. Polisi memberi pelayanan, keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- f. Polisi membudayakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap norma kesusilaan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Polisi dalam menjalankan perannya, tugas, fungsi dan wewenang berdasarkan pada UU No. 2 tahun 2002. Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Fungsi Kepolisian sebagai salah satu instansi pemerintah, menjadikan lembaga yang memberikan pelayanan publik dalam bentuk menjaga keamanan dalam negeri. Guna mendukung hal tersebut pihak kepolisian memiliki kewenangan melalui tindakan-tindakan dalam proses penegakan hukum, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan hal tersebut merupakan dari tujuan Kepolisian Republik Indonesia

## **2. Keamanan**

Pengertian keamanan menurut kamus bahasa Indonesia adalah ketentraman, kondisi aman. Keamanan negeri ini akan normal jika masing-masing pihak menyadari akan dari perbuatan kerusuhan<sup>11</sup>. Bahwasannya safety needs atau kebutuhan-kebutuhan akan perlindungan untuk melawan bahaya ancaman, pencabutan atau perampasan (deprivation), serta keamanan

---

<sup>11</sup> Tim Media, *Kamus bahasa Indonesia*, Media Centre, (tempat tahun dan tempat penerbitan)

misi serta dapat mensosialisasikan progam-progam, visi dan misi serta dapat menjadikan ajang silaturahmi antar pengurus, simpatisan, masyarakat serta menjalin hubungan dengan masyarakat luas, system door to door ini bukan berarti satu rumah kerumah untuk mensosialisasikan progam tetapi melalui kelompok-kelompok kecil yang ada di kecamatan-kecamatan dan sebagainya.

- Bantuan sembako dan bantuan-bantuan lain

Bentuk untuk menarik masa yaitu dengan bentuk kampanye dengan sembako atau bantuan-bantuan lain. Bentuk kampanye dengan sembako sifatnya memang materiil, bentuk ini secara langsung maupun tidak langsung akan memberi dampak positif yaitu setidaknya mengurangi beban masyarakat walaupun hanya beberapa saat.

- Pengajian

Pengajian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Pengajian rutin

Dari pengajian ini mempunyai banyak waktu untuk mensosialisasikan progam, visi dan misi partai hanya saja yang perlu diingat adalah dalam membuat

b. Pengajian akbar

Pengajian ini memang dilakukan hanya beberapa saat sebelum mendekati pemilu, biaya yang digunakan adalah relatif besar tetapi efek bagi khalayak umum sangat besar karena merupakan kegiatan partai yang nampak dari luar .

c. Diskusi kelompok atau kelompok

Bentuk ini kurang banyak digunakan karena masyarakat menganggap hal tersebut tidak “nyandak”<sup>12</sup> untuk Berfikir yang dipikirkan adalah urusan-urusan yang dianggap mereka penting karena bentuk ini berkaitan dengan tingkat pendidikan tinggi maka bentuk ini tepat digunakan lain hal dengan kebalikannya.

d. Pawai atau kampanye

Secara umum kampanye memang tidak terlalu perlu tetapi porsinya hanya dikurangi saja, hal yang perlu diperhatikan adalah dimana tempat dan situasi dan kondisi. Misalnya daerah mana yang perlu unjuk kekuatan.

b. Bentuk Tak Langsung

Suatu bentuk kampanye di mana komunikator tidak langsung berhubungan dengan komunikan. Arus informasi yang terjadi dalam kampanye ini lebih bersifat komunikasi satu arah. Sebab mayoritas

<sup>12</sup> Menggunakan istilah bahasa jawa yang berarti tidak menampar atau menyalak.

cara yang digunakan dalam kampanye massa menggunakan alat-alat bantu, seperti media elektronika maupun media massa yang lainnya.

Komunikan dan komunikator berada dalam satu kelompok yang “kecil” yang memungkinkan komunikan memberikan respon langsung terhadap ide-ide yang dikemukakan oleh komunikator. Kalau kelompok politik atau partai politik yang mendukung kampanye seorang komunikator yang memiliki pemilih tradisional (*tradisional voter*), misalnya anggapan yang selama ini berlaku.

Kampanye harus seperti hubungan antara uang dengan perekonomian, yaitu harus mengutamakan prinsip efektifitas dan efisien. Efektif maksudnya bahwa partai yang bersangkutan efisien bila dapat memenangkan suara dibanding pemilu sebelumnya dengan tenaga dan dana yang sama.

Kampanye adalah merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan pada tahap sebelum pemungutan suara adapun yang dimaksud dengan kampanye adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para kontestan pemilihan umum (dalam hal ini adalah partai-partai politik yang ambil bagian dalam pemilihan umum) untuk menarik sebanyak mungkin pendukung, dimana pada gilirannya pendukung ini akan memberikan suaranya kepada partai politik yang menariknya tadi<sup>13</sup>. Setiap partai yang terlibat dalam pertarungan untuk

---

<sup>13</sup> Harjanto, *Partai politik suatu tinjauan umum*, Yogyakarta: Liberty, 1994, hal. 109

memperoleh jumlah suara sebanyak mungkin dapat dipastikan tidak akan melewatkan kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam kampanye.

Partai tersebut dalam menjelaskan program-program menyelenggarakan rapat-rapat raksasa dan menyelipkan hiburan dengan maksud menarik sebanyak mungkin pengunjung sebelum partai politik yang bersangkutan memaparkan program-programnya. Selain itu juga diselenggarakan pawai keliling kota atau mengadakan tour, para pendukung partai politik yang menyelenggarakan kegiatan tersebut menyelenggarakan baju seragam yang berfungsi menunjukkan identitas partainya.

Kampanye politik dalam rangka pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para "kontestan" guna memberikan pengaruh dan simpati dikalangan masyarakat dengan menjelaskan program-program perjuangan politiknya bagi kepentingan bangsa dan negara, sehingga dengan cara demikian masing-masing kontestan berusaha untuk meraih suara sebanyak-banyaknya pada saat pemungutan suara.

#### **b. Pemifu**

Di Indonesia pemilihan umum dilakukan setiap lima tahun sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. hal ini menunjukkan bahwa setiap lima tahun sesuai penyelenggaraan pemilihan umum akan terbentuk pemerintahan baru.



Dalam undang tersebut dinyatakan bahwa dalam pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan dalam rangka mengikutkan sertakan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa salah satu ciri dari negara demokrasi telah nampak. Partisipasi rakyat yang diwujudkan dalam keikutsertaan dalam pemilihan umum yang demokratis merupakan indikasi pelaksanaan demokrasi.

Pemilihan umum 2004 diikuti oleh 48 partai politik yang terdiri dari partai politik lama sisa rezim Orde Baru dan partai-partai baru. Dasar dan asas partai-partai politik itupun beragam, seperti nasionalis, agama, pekerjaan dan lain-lain. Pemilihan umum 2004 merupakan sarana untuk memasuki gerbang informasi disegala bidang untuk bidang untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis nasional. Oleh karena itu diharapkan pemilu 2004 ini akan dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

#### **E. Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional yaitu merupakan suatu pengertian dari kelompok atau gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konsepsional ini dimaksudkan sebagai gambaran yang lebih jelas untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap pengertian atau batasan pengertian tentang istilah yang ada dalam subjek

### 1. Peranan

adalah konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah peranan Polri dalam penanganan keamanan pada masa kampanye pemilu 2004 adalah pengaruh yang diberikan sesuai dengan kedudukan Polri sebagai aparat negara yang memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan selama masa kampanye.

### 2. Keamanan

Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasarat terselenggarakan proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menganggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

### 3. Kepolisian

adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyat dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan.

### 4. Kampanye

Adalah merupakan sarana untuk mensosialisasikan program-program dan isu-isu politik dari suatu organisasi politik

## 5. Pemilu

Sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam negara Republik Indonesia.

## F. Definisi Operasional

Peranan Polri dalam penanganan keamanan di wilayah kota Yogyakarta selama masa kampanye pemilu 2004. Berdasarkan UU No. 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaannya secara teknis.

### 1. Tugas Kepolisian :

- a. Memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

### 2. Fungsi Kepolisian

Sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat , penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dalam pelaksanaannya.

### 3. Wewenang kepolisian

Tindakan-tindakan guna mendukung tugas Kepolisian.

Untuk menjelaskan peran utama dalam pelaksanaan Undang –undang tersebut penulis menekankan pada tugas Kepolisian.

## G. Metode Penelitian

Dalam mengadakan penelitian, penyusun menggunakan metode atau cara untuk mempermudah dalam mengumpulkan data. Pengertian metode penelitian dikemukakan oleh Winarno Surachmad sebagai berikut :

“Metode penelitian adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, dengan mempergunakan teknik tertentu. Cara utama itu setelah penyusun mempertimbangkan kewajaran ditinjau dari tujuan penelitian”<sup>14</sup>.

Metode tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Metode penelitian deskriptif ini adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Adapun metode penelitian deskriptif ini ciri-cirinya sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Merupakan metode untuk membuat gambaran mengenai situasi, kejadian dan peristiwa. Sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data belaka atau survey
2. Memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, menerangkan hubungan – hubungan, mengaju hipotesis-hipotesis, serta membuat prediksi serta menciptakan makna dan implikasi suatu masalah yang ingin dipecahkan.
3. Mengumpulllkan data-data dengan wawancara, menggunakan schedule, dan interview guide.

---

<sup>14</sup> Widiyanti, S. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Raniry.

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara variabel-variabel yang diselidiki.

Sedangkan untuk menganalisa data penyusun menggunakan teknik analisa kualitatif. Dimana sifat dan bentuk dari penelitian kualitatif ini adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya, tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak, atau tentang suatu proses yang sedang bekerja, kelainan yang muncul, kecenderungan yang sedang nampak, pertentangan yang sedang mcruncing dan lain sebagainya.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat penelitian ini adalah kantor Kepolisian Kota Besar Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak dijalan Reksobayan No. 1 . Alasan mengambil lokasi di kota Yogyakarta adalah karena heterogenitas penduduk sangat tinggi serta adanya permasalahan sosial ekonomi yang timbul, selain itu juga masih adanya laporan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye pemilu 2004 yang mengarah pada gangguan keamanan.

## **3. Unit Analisa Data**

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas dan pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini akan melakukan kegiatan, yaitu unit analisa data pada pihak yang terkait dan yang relevan serta dengan pembahasan-pembahasan yang secara tepat untuk dijadikan sumber data yang

diperlukan dalam penelitian ini, yaitu pihak dari Kepolisian Kota Besar Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penetapan sumber data penelitian diatas, didasarkan pada pertimbangan bahwa ruang lingkup penelitian berada di wilayah Kodya Yogyakarta dan Intansi tersebut yang langsung menanganinya berkenaan dengan masalah keamanan.

#### **4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data primer dan sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari keterangan pihak-pihak yang berkompeten atau terkait dengan masalah yang ada di penelitian ini. Secara sederhana ini juga disebut data asli.

##### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah yang diperoleh dari buku, artikel, dokumen dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting karena akan menentukan hasil penelitian yang diharapkan. Adapun teknik yang digunakan oleh penulis dalam menyusun data yaitu sebagai berikut :

##### **a. Wawancara**

Wawancara yang dimaksud adalah penyusun adalah pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan

secara lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada peneliti.

**b. Dokumentasi**

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan (jurnal) atau laporan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat digunakan untuk memperjelas dan mendukung data-data dari hasil wawancara.

**c. Observasi**

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung. Dimana peneliti secara langsung melihat kondisi yang sebenarnya yang ada di lapangan, sehingga ini bermanfaat untuk mendukung serta melengkapi analisa data primer dan sekunder.

**6. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data adalah cara untuk menganalisa data dengan menggunakan data yang diperoleh. Data-data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen arsip lainnya yang diklasifikasikan, serta diinterpretasikan sesuai dengan kata-kata yang disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan penelitian.

Prof. Dr. Noeng Muhajir dalam bukunya "Metode Penelitian Kualitatif" menyatakan bahwa :

" Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman

peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain”<sup>16</sup>.

Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Karena skripsi ini jenisnya datanya ditumpukan pada hasil interview dan studi dokumentasi, maka analisa data dalam penelitian ini memakai model analisa kualitatif yaitu:

Usaha untuk mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atas berbagai data yang diperoleh<sup>17</sup>.

Didalam penerapan metode ini, pelaksanaan penelitian akan menyesuaikan dengan semua informasi, dokumentasi dan lain sebagainya yang ada di daerah penelitian, yang mempunyai hubungan dengan peranan Polri dalam penanganan keamanan di wilayah kota Jogja pada masa kampanye pemilu 2004. Akhirnya penyusun akan menyimpulkan hasil dari penelitian ini sesuai dengan data atau materi yang diperoleh.

---

<sup>16</sup> Noeng Muhajir, *Metode penelitian kualitatif*, Yogyakarta, Rakesarasin, 1996, hal. 120

<sup>17</sup> Noeng Muhajir, *Metode penelitian kualitatif*, Yogyakarta, Rakesarasin, 1996, hal. 120